

## PENGARUH INFLASI, IPM, UMP DAN PDRB TERHADAP KEMISKINAN DI PULAU SUMATERA

Handika Permana<sup>1</sup>; Esti Pasaribu<sup>2</sup>

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bengkulu,  
Indonesia<sup>1,2</sup>

Email : handikapermanabkl@gmail.com<sup>1</sup>; estipasaribu@unib.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Sumatera. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera dengan rentang waktu tahun 2015 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan teknik regresi data panel, dengan model terbaik terpilih adalah *fixed effect model* (FEM). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara statistik menunjukkan dampak negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, inflasi menunjukkan pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM, PDRB, dan UMP dapat menurunkan tingkat kemiskinan, sedangkan penurunan tingkat inflasi juga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Implikasi kebijakan yang dapat disarankan adalah perlunya mengendalikan inflasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menetapkan UMP agar sesuai dengan kondisi perekonomian di suatu daerah tersebut, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.

Kata kunci : Kemiskinan; Inflasi; IPM; PDRB; UMP

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the influence of inflation, Human Development Index (HDI), Provincial Minimum Wage (UMP), and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on poverty on the island of Sumatra. The data used in this research is panel data taken from all of the regencies/cities in ten provinces on the island of Sumatra in the 2015-2022 period. The analytical method used in this research is panel data regression with a fixed effect model (FEM) approach. The research results show that HDI, GRDP, and UMP negatively and significantly influence the poverty level. In contrast, inflation positively and significantly impacts the poverty level. The results indicate that HDI, GRDP, and UMP can reduce poverty, while inflation can increase poverty. The policy implications that can be suggested are the need to control inflation, improve the quality of human resources, determine the UMP to suit the economic conditions in a region, and encourage fair and equitable economic growth.*

*Keywords : Poverty; Inflation; HDI; GRDP; UMP*

### PENDAHULUAN

Kemiskinan di negara-negara berkembang merupakan permasalahan yang terbilang sangat kompleks, dan pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama

dalam menentukan kebijakan di banyak negara berkembang (Wang et al. 2020). Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keadaan tidak mampu mencapai tingkat kehidupan dasar yang sesuai dengan bakat dan sumber daya yang dimiliki seseorang. Penilaian kemiskinan dapat berfungsi sebagai indikator penting untuk mengevaluasi keadaan kesejahteraan suatu negara. Tingkat kemiskinan digunakan sebagai ukuran keseluruhan kesejahteraan suatu daerah. Konsep yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik dan beberapa negara lain memperkirakan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan dan non pangan (diukur dengan pengeluaran).

Mengatasi masalah kemiskinan, terdapat berbagai macam upaya yang dapat dilakukan pemerintah, diantaranya termasuk dalam mengendalikan tingkat inflasi (Pasaribu 2022). Inflasi dapat didefinisikan sebagai fenomena yang terus-menerus dan meluas yang ditandai dengan peningkatan progresif dalam biaya sumber daya primer. Apabila hanya terdapat satu barang saja yang mengalami peningkatkan harga, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan inflasi, namun jika kenaikan harga suatu barang tersebut dapat mempengaruhi harga barang lainnya. Inflasi dapat berdampak pada kemiskinan melalui dua saluran: saluran pendapatan riil dan saluran distribusi pendapatan. Saluran pendapatan riil mengacu pada dampak inflasi terhadap daya beli individu, sedangkan saluran distribusi pendapatan mengacu pada dampak inflasi terhadap kesenjangan antar kelompok dalam masyarakat (Gweshengwe and Hassan 2020).

Pertumbuhan ekonomi merupakan topik penting bagi negara maju dan berkembang mencari pertumbuhan produksi dan konsumsi. Ada beberapa manfaat bagi negara-negara yang ingin memperbaiki pembangunan ekonomi melalui investasi pembangunan manusia. Manfaat utamanya adalah memperbaiki kesejahteraan warga negara. (Bagianto, A., & Zulkarnaen, W. 2020:317). Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang yang mana tingkat kemiskinan menjadi permasalahan utama (Armelly, Rusdi, and Pasaribu 2021). Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik merilis data tingkat kemiskinan terbaru di Indonesia diperkirakan akan mencapai 24,79 juta jiwa pada tahun 2023. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 23,97 juta penduduk miskin. Kemiskinan di Indonesia saat ini nampaknya tengah

menjadi permasalahan yang serius dan cukup kompleks, dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hariannya (Purwono et al. 2021).

Pulau Sumatera dikenal sebagai salah satu pulau terbesar di kepulauan Indonesia, yang memiliki warisan budaya yang beragam dan sumber daya alam yang melimpah yang menawarkan banyak peluang untuk dimanfaatkan. Namun demikian, di balik daya tarik estetika dan keragaman lanskap pulau ini, terdapat permasalahan kemiskinan yang terus menjadi hambatan besar bagi kemajuan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, Pulau Sumatera memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 5763.42 ribu jiwa hal ini menyebabkan pulau Sumatera merupakan pulau termiskin kedua setelah pulau Jawa. Dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera, ada empat provinsi yang masuk dalam kategori 15 provinsi termiskin di Indonesia, yaitu Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Aceh merupakan provinsi termiskin di Pulau Sumatera dengan tingkat kemiskinan sebesar 14,75%, diikuti oleh Bengkulu dengan 14,34%, Sumatera Selatan dengan 11,95%, dan Lampung dengan 11,44%.

Grafik 1 menggambarkan bahwa presentase kemiskinan di setiap provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera pada periode 2015-2022 selalu mengalami fluktuatif. Namun dapat diketahui bahwa Provinsi Aceh memiliki angka kemiskinan tertinggi yang ada di rata-rata persentase kemiskinan di Pulau Sumatera sebesar 15,37%, sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki angka kemiskinan terendah yaitu rata-rata sebesar 4,83%.

Besarnya kemiskinan di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran dalam perekonomian (Sugiharti et al. 2022). Unsur-unsur yang dipertimbangkan meliputi inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Inflasi dapat didefinisikan sebagai fenomena yang terus-menerus dan meluas yang ditandai dengan kenaikan harga secara progresif, yang mengakibatkan penurunan kemampuan individu untuk membeli barang dan jasa. IPM merupakan ukuran kualitas hidup seseorang yang mencakup beberapa aspek terkait pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. UMP dijadikan sebagai suatu ukuran kompensasi minimum yang harus dibayarkan oleh pengusaha terhadap pekerja yang ada di suatu provinsi.

UMP dapat mempengaruhi kemiskinan melalui dua saluran, yaitu saluran upah riil dan saluran kesempatan kerja. Saluran upah riil mengacu pada pengaruh UMP terhadap daya beli pekerja, sedangkan saluran kesempatan kerja mengacu pada pengaruh UMP terhadap permintaan tenaga kerja oleh pengusaha. PDRB merupakan nilai tambah dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah atau wilayah tertentu.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Sumatera. Di masa depan, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan rekomendasi berharga bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan dalam upaya mereka mengembangkan kebijakan yang secara efektif mengatasi masalah kemiskinan di Pulau Sumatera.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### **Kemiskinan**

Tingginya tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan dalam proses pembangunan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut (Hildegunda 2010) Kemiskinan mengacu pada kondisi dimana individu atau rumah tangga mengalami kendala ekonomi yang menghambat mereka mencapai tingkat kesejahteraan material yang umum di wilayah geografis tertentu. Keadaan ketidakberdayaan ini ditandai dengan ketidakmampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penting sehari-hari, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan. Terbatasnya kapasitas pendapatan yang terkait dengan rendahnya pendapatan sering kali menyebabkan berkurangnya kapasitas untuk mencapai standar sosial tertentu, seperti pencapaian pendidikan dan standar kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dikatakan sebagai permasalahan kemasyarakatan yang memiliki banyak segi dan mencakup berbagai dimensi, yaitu ketidakmampuan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Beberapa peneliti mengartikan bahwa kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan dalam melakukan pemenuhan atas kebutuhan dasarnya diantaranya seperti sandang, pangan dan papan, sedangkan lingkungan masyarakat tidak memberikan peluang atau harapan untuk dapat

melakukan perbaikan kesejahteraan secara berkelanjutan atau melepaskan diri dari terjadinya keburukan yang semakin membahayakan (Adawiyah 2020; mad et al. 2019). Sedangkan menurut (Hardinandar 2019) Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana tidak adanya kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pangan, serta kebutuhan lain yang dibutuhkan secara dadakan seperti obat-obatan.

### **Inflasi terhadap Kemiskinan**

Inflasi adalah kejadian makroekonomi yang ditandai dengan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan secara terus-menerus. Menurut Boediono (2014:161), tidak tepat mengklasifikasikan kenaikan harga antara satu atau dua komoditas tertentu sebagai inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas dan mempengaruhi harga sebagian besar barang lainnya. Menurut (Al Makhrus and Priyadi 2022), inflasi ditandai dengan kenaikan harga yang terus-menerus dan meluas sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan individu dalam membeli barang dan jasa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih and Andiny 2018), temuan penelitian mereka menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan secara statistik antara inflasi dan tingkat kemiskinan. Beberapa penelitian yang dibuat oleh (Isiaka, Najeem and Olaniyi 2022; Mardiatillah, Panorama, and Maftukhatusolikhhah 2021; Ratih Primandari 2019; Simanungkalit 2023; Suharianto and Lubis 2022) juga menunjukkan hasil yang sama.

### **H1 : Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah metrik yang banyak digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan manusia secara keseluruhan di berbagai negara. Hal ini memperhitungkan faktor-faktor kunci seperti harapan hidup, tingkat melek huruf, pencapaian pendidikan, dan kondisi kehidupan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai alat untuk menilai klasifikasi suatu negara menjadi maju, berkembang, atau terbelakang. Selain itu, analisis ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup suatu negara secara keseluruhan. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu tingkat kemiskinan. Penilaian terhadap sumber daya manusia dapat diukur melalui pemanfaatan indikator seperti indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah dikaitkan dengan penurunan produktivitas tenaga kerja dalam populasi. Ada korelasi antara produktivitas rendah dan pendapatan rendah. Oleh karena itu, mereka yang memiliki sumber daya keuangan terbatas mungkin mengalami prevalensi kemiskinan yang lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ayu Nurlita, Haris Musa, and Budi Suharto 2017; Irawan 2022), ditemukan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan dampak yang cukup besar dan korelasi negatif terhadap prevalensi kemiskinan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian (Andhykha, Handayani, and Woyanti 2018; Azriyansyah 2022; Azzahra, Westi Riani, and Mafruhat 2022; Ela Melia Nisa and Elok Fitriani Rafikasari 2022; Ferdi 2022; Prasetyoningrum 2018)

## **H2 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Sumatera**

### **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan**

PDRB adalah jumlah nilai tambah dari barang dan jasa atau nilai akhir dari barang dan jasa yang diproduksi oleh semua unit usaha di wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan PDRB, yang menggambarkan besaran maupun distribusi pendapatan antara berbagai kelompok dan golongan di masyarakat. Angka PDRB suatu wilayah mencerminkan kemampuan wilayah tersebut dalam mengoptimalkan sumber daya daerah (Damanik and Sidauruk 2020).

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa produk domestik bruto regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di berbagai daerah. Misalnya, (Damanik and Sidauruk 2020; Hasibuan et al. 2022) menunjukkan bahwa semakin tinggi produk domestik bruto regional, semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal ini juga didukung oleh (Fatmasari 2017; Pramesona 2021; Ritonga and Wulantika 2020; Syahputri and Fisabilillah 2023; Syofria Meidona et al. 2022) yang menghasilkan temuan serupa dengan menggunakan data dan metode yang berbeda. Dengan demikian, produk domestik bruto regional merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah.

## **H3 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Sumatera**

### **Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kemiskinan**

Upah minimum adalah ambang batas yang diwajibkan secara hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, yang berlaku bagi individu yang belum menyelesaikan satu tahun masa kerja. Ada dua kategori upah minimum yang berbeda, yaitu upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). UMP mewakili upah minimum yang berlaku secara universal di seluruh provinsi, sedangkan UMK menunjukkan upah minimum yang berlaku khusus di kabupaten atau kota tertentu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fajriansyah and Chandriyanti 2022) temuan penelitian mereka menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara statistik dan tidak menguntungkan antara upah minimum provinsi dan tingkat kemiskinan. Beberapa penelitian yang lain juga menunjukkan hasil yang sama (Agustin, Hidayat, and Umiyati 2019; Aprilia 2016; Utami 2018; Yelvita 2022)

### **H4 : Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Sumatera**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dimaksud menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2015 hingga 2022. Data tersebut dikumpulkan secara khusus dari 10 provinsi yang berada di Pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data panel dan software EViews sebagai alat analisis utama. Proses pengujian data melibatkan beberapa langkah, yang mencakup beberapa pengujian. Pengujian ini meliputi pengujian identifikasi model seperti pengujian Chow dan Hausman. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis yaitu uji F untuk uji signifikansi simultan dan uji t untuk uji signifikansi parsial. Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y<sub>t</sub>: Jumlah Penduduk Miskin
- β<sub>0</sub>: konstanta
- X<sub>1</sub>: Inflasi
- X<sub>2</sub>: Indeks Pemabangunan Manusia
- X<sub>3</sub>: Produk Domestik Regional Bruto
- X<sub>4</sub>: Upah Minimum Provinsi
- e : error term

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### Hasil Uji Penentuan Model

#### 1. Uji Chow

Salah satu pendekatan potensial untuk memilih metode estimasi yang sesuai untuk data panel adalah dengan melakukan Uji Chow. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis mengenai kesesuaian model Common Effect (CE) atau Fixed Effect (FE) untuk analisis data panel.

Apabila Hasil:

H0: probabilitas  $> 0,05$  Pilih CE

H1: probabilitas  $< 0,05$  Pilih FE

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai prob chi square sebesar  $0,000 < 0,05$  maka dipilih model Fixed effect Model (FEM)

#### 2. Uji Hausman

Uji Hausman adalah teknik statistik yang digunakan untuk menilai kesesuaian penggunaan model Efek Tetap atau Efek Acak untuk analisis data panel.

Apabila Hasil:

H0: probabilitas  $> 0,05$  Pilih RE

H1: probabilitas  $< 0,05$  Pilih FE.

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai prob section random sebesar  $0,000 < 0,05$  maka dipilih model Fixed effect Model (FEM)

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normality

Salah satu asumsi yang mendasari analisis regresi adalah normalitas residu, yaitu residu menunjukkan pola sebaran normal atau hampir normal. Ada metode lain yang tersedia untuk menguji kenormalan sisa, termasuk uji Jarque-Bera (JB). Pemeriksaan ini memerlukan penghitungan nilai skewness dan kurtosis sisa, yang selanjutnya disandingkan dengan nilai distribusi normal standar. Jika p-value uji JB melebihi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residu mengikuti distribusi normal. Namun jika nilai probabilitas uji JB kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal.

Dari tabel 3 menyatakan bahwa probabilitas  $(0,119184) > \alpha (0,05)$  maka data terdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas mengacu pada keadaan di mana variabel independen dalam model regresi menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi satu sama lain. Fenomena ini berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dan ketidakstabilan dalam model regresi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan uji multikolinearitas yang dirancang khusus untuk memastikan ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi. Salah satu pendekatan dalam melakukan Uji Multikolinearitas adalah dengan menguji nilai koefisien korelasi antar variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi antar variabel independen melebihi 0,8 maka menunjukkan adanya multikolinearitas dalam model regresi. Sebaliknya, apabila nilai koefisien korelasi antar variabel independen kurang dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa adanya multikolinearitas tidak mempengaruhi model regresi.

Dari tabel 4 menyatakan bahwa tidak ada nilai koefisien korelasi antara variabel-variabel independen  $> 0,8$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi ketika varians residu tidak konstan dalam model regresi. Residu adalah selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi dari model regresi. Heteroskedastisitas dapat mengganggu hasil estimasi parameter dan uji hipotesis dalam model regresi. Salah satu cara untuk menguji adanya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser memeriksa apakah ada korelasi antara nilai absolut residu dengan variabel penjelas. Jika ada korelasi, maka itu berarti ada heteroskedastisitas. Jika tidak ada korelasi, maka itu berarti tidak ada heteroskedastisitas. Untuk melakukan uji Glejser, kita perlu melihat nilai probabilitas dari koefisien regresi variabel penjelas. Jika nilai probabilitas  $< 0.05$ , maka kita tolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas  $> 0.05$ , maka kita terima hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Dari tabel 5 di atas menyatakan bahwa nilai prob variabel independen menunjukkan nilai yang lebih besar dari tingkat alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Hasil Analisis Regresi

### 1. *R-squared*

Berdasarkan data pada Tabel 6, koefisien determinasi (R-squared) dihitung sebesar 0,997468. Temuan ini menunjukkan bahwa inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Provinsi (UPM) secara kolektif menyumbang 99% pengaruh terhadap kemiskinan, dan 1% sisanya disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak diperhitungkan dalam model.

### 2. *Pengujian Hipotesis*

Setelah memilih model terbaik, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis untuk menjawab pertanyaan terkait permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji signifikansi statistik parsial atau uji-t.

### 3. *Uji Statistik Secara Simultan (Uji-F)*

Pengujian statistik adalah pengujian seluruh variabel independen dalam suatu model melalui penggunaan uji statistik simultan atau uji F. Uji statistik F menilai kesetaraan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model tertentu. Kemungkinan F-statistik yang diperoleh sebesar 0,000000, lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu  $\alpha = 0,05$ , menyebabkan ditolaknya hipotesis nol ( $H_0$ ). Penolakan ini menyiratkan adanya dampak kolektif Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Provinsi (UPM) terhadap Kemiskinan di Pulau Sumatera.

### 4. *Uji Statistik Secara Parsial (Uji-t)*

#### 4.1 Inflasi

Berdasarkan analisis data diperoleh koefisien inflasi sebesar 0,003335 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,05 < \alpha = 0,05$ . Temuan ini menunjukkan bahwa inflasi mempunyai pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Secara khusus, hal ini menyiratkan bahwa untuk setiap kenaikan inflasi sebesar 1%, terdapat peningkatan kemiskinan sebesar 1, dengan memperhitungkan variabel-variabel lainnya. Istilah "konstan" mengacu pada nilai yang tetap tidak berubah atau konsisten sepanjang konteks tertentu.

#### 4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan analisis data diketahui nilai koefisien Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar  $-0,029272$  dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0045$ , lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu  $\alpha = 0,05$ . Temuan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan dampak negatif yang signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1 unit, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat sebesar 1 unit, jika semua faktor lainnya tidak berubah.

#### 4.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan temuan analisis data, nilai koefisien yang ditetapkan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah  $-1,467832$ . Nilai koefisien tersebut disertai dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,0000$ , lebih kecil dari ambang batas yang telah ditentukan yaitu  $\alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1 juta akan mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 1 juta, asalkan semua faktor lainnya tetap sama.

#### 4.4 Upah Minimum Provinsi (UPM)

Berdasarkan analisis data diperoleh nilai koefisien Upah Minimum Provinsi (UPM) sebesar  $-0,106845$  dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi  $0,0002$ , kurang dari ambang batas yang telah ditentukan yaitu  $\alpha = 0,05$ . Temuan ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UPM) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan inflasi sebesar 1 juta unit, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat sebesar 1 unit, dengan asumsi bahwa semua faktor lainnya tetap sama.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh inflasi terhadap kemiskinan**

Inflasi merupakan suatu fenomena lonjakan harga barang dan jasa secara keseluruhan dan terus menerus dalam suatu perekonomian. Dalam penelitian ini inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan, hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Isiaka, Najeem and Olaniyi 2022; Mardiatillah et al. 2021; Ningsih and Andiny 2018; Ratih Primandari 2019; Simanungkalit 2023; Suharianto and Lubis 2022), yaitu ketika inflasi meningkat maka kemiskinan juga akan meningkat. Meningkatnya inflasi

menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Artinya masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Akibatnya, mereka hanya punya sedikit uang untuk ditabung atau diinvestasikan.

Kenaikan inflasi juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan inflasi. Akibatnya, pemerintah memiliki anggaran yang lebih terbatas untuk alokasi pembangunan, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Hal ini menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di Pulau Sumatera.

### **Pengaruh IPM terhadap kemiskinan**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Nilai IPM yang lebih tinggi menunjukkan kualitas hidup penduduk yang lebih baik. Dalam penelitian ini, IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Andhykha et al. 2018; Ayu Nurlita et al. 2017; Azriyansyah 2022; Azzahra et al. 2022; Ela Melia Nisa and Elok Fitriani Rafikasari 2022; Ferdi 2022; Irawan 2022; Prasetyoningrum 2018), yaitu semakin tinggi IPM di Pulau Sumatera, semakin rendah tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Untuk itu salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kemiskinan di Pulau Sumatera adalah dengan cara meningkatkan IPM.

Peningkatan IPM dapat menurunkan kemiskinan karena berbagai alasan. Pertama, peningkatan harapan hidup berarti masyarakat memiliki kesempatan lebih lama untuk bekerja, berproduksi, dan menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kemungkinan jatuh miskin. Kedua, peningkatan pendidikan berarti masyarakat memiliki akses lebih baik ke pengetahuan, keterampilan, dan peluang kerja. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan mobilitas sosial. Ketiga, peningkatan pendapatan per kapita berarti masyarakat memiliki daya beli lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan sosial.

Oleh karena itu, peningkatan IPM dapat menurunkan kemiskinan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Peningkatan IPM juga dapat menciptakan lingkaran positif di mana masyarakat yang sejahtera dapat berkontribusi lebih banyak untuk pembangunan nasional dan global.

### **Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berfungsi sebagai indikator yang mengukur tingkat pembangunan ekonomi di suatu wilayah tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur total nilai yang diciptakan oleh penduduk suatu wilayah geografis tertentu melalui kegiatan ekonomi mereka. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh buruk terhadap kemiskinan, sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh (Damanik and Sidauruk 2020; Fatmasari 2017; Hasibuan et al. 2022; Pramesona 2021; Ritonga and Wulantika 2020; Syahputri and Fisabilillah 2023), sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya PDRB di Sumatera maka angka kemiskinan di Sumatera akan menurun.

Salah satu dampak positif dari pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB adalah penurunan angka kemiskinan. Hal ini dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Pertama, pertumbuhan ekonomi dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau hanya bekerja secara paruh waktu. Dengan bekerja, mereka dapat memperbaiki kesejahteraan mereka dengan mendapatkan penghasilan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kedua, fenomena pertumbuhan ekonomi berpotensi meningkatkan pendapatan rata-rata individu yang berada dalam suatu wilayah geografis tertentu, yang biasa disebut pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang tinggi menandakan kemampuan individu untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan. Selain itu, perlu dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai potensi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah yang berasal dari perpajakan, sehingga memungkinkan pendanaan bagi beragam inisiatif pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat, dengan fokus khusus pada program-program yang menasar segmen masyarakat miskin. Program-program tersebut dapat berupa bantuan tunai, subsidi, modal usaha, pelatihan kerja, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan lain-lain.

### **Pengaruh UMP terhadap kemiskinan**

UMP adalah standar upah minimum yang berlaku di suatu provinsi, yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan

politik. UMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Dalam penelitian ini UMP memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Agustin et al. 2019; Aprilia 2016; Fajriansyah and Chandriyanti 2022; Utami 2018; Yelvita 2022) yang artinya ketika terjadi peningkatan pada UMP di Pulau Sumatera maka kemiskinan akan menurun di Pulau Sumatera.

Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia berjumlah sekitar 26,16 juta jiwa pada September 2022. Sekitar 5,76 juta jiwa bertempat tinggal di Pulau Sumatera, yang mana menduduki peringkat kedua pulau di Indonesia dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Salah satu faktor penentu kemiskinan adalah tidak memadainya pendapatan individu, khususnya mereka yang bekerja. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan terkait upah minimum provinsi (UMP) untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memitigasi kesenjangan sosial ekonomi.

Pada tahun 2022, pemerintah menetapkan kenaikan UMP sebesar 8% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penurunan tingkat kemiskinan, dengan beberapa alasan; pertama, kenaikan UMP dapat meningkatkan daya beli pekerja, yang berarti mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dengan lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi risiko mereka untuk jatuh ke dalam kemiskinan. Kedua, kenaikan UMP dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, karena meningkatnya daya beli pekerja akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini dapat mendorong produksi dan investasi sektor riil, yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menambah pendapatan masyarakat. Ketiga, kenaikan UMP dapat meningkatkan produktivitas pekerja, karena mereka akan merasa lebih termotivasi dan dihargai dengan adanya peningkatan upah. Hal ini dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi mereka dalam bekerja, yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk atau jasa yang mereka hasilkan.

Dengan demikian, kenaikan UMP dapat menjadi salah satu strategi untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera, dengan asumsi bahwa kenaikan tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi daerah dan tidak menimbulkan dampak negatif lain seperti inflasi atau pengangguran. Akan tetapi, kenaikan UMP juga harus disertai

dengan kebijakan lain yang mendukung seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberantasan korupsi, dan pemberdayaan masyarakat miskin.

### KESIMPULAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Sumatera. Penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup 10 provinsi di pulau Sumatera, dengan rentang waktu 2015 hingga 2022. Pendekatan analitis yang digunakan adalah dengan menggunakan regresi data panel, khususnya menggunakan fixed effect model (FEM). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) mempunyai dampak negatif yang signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Sebaliknya, inflasi menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpotensi memitigasi kemiskinan, sedangkan inflasi berpotensi memperparah kemiskinan. Kajian ini memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan, khususnya: (1) pemerintah perlu mengelola inflasi secara efektif dalam kisaran sasaran yang telah ditetapkan; (2) pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan masyarakat; (3) pemerintah harus menetapkan upah minimum spesifik daerah yang selaras dengan kondisi perekonomian dan produktivitas tenaga kerja di setiap provinsi; dan (4) pemerintah harus secara aktif mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang mendorong terciptanya lapangan kerja dan memitigasi kesenjangan antar wilayah.

Diharapkan lebih banyak variabel yang dapat ditambahkan pada penelitian selanjutnya dan berpotensi untuk mempengaruhi kemiskinan seperti pengangguran dan ketimpangan pendapatan, serta memperluas cakupan wilayah penelitian dan periode penelitian, misalnya dengan membandingkan Pulau Sumatera dengan pulau-pulau lain di Indonesia atau menggunakan data yang berusia lebih dari 10 tahun dan mampu melakukan analisis lebih dalam mengenai faktor-faktor yang

melatarbelakangi atau yang menjadi penyebab dan juga dampak kemiskinan di setiap Provinsi di Pulau Sumatera.

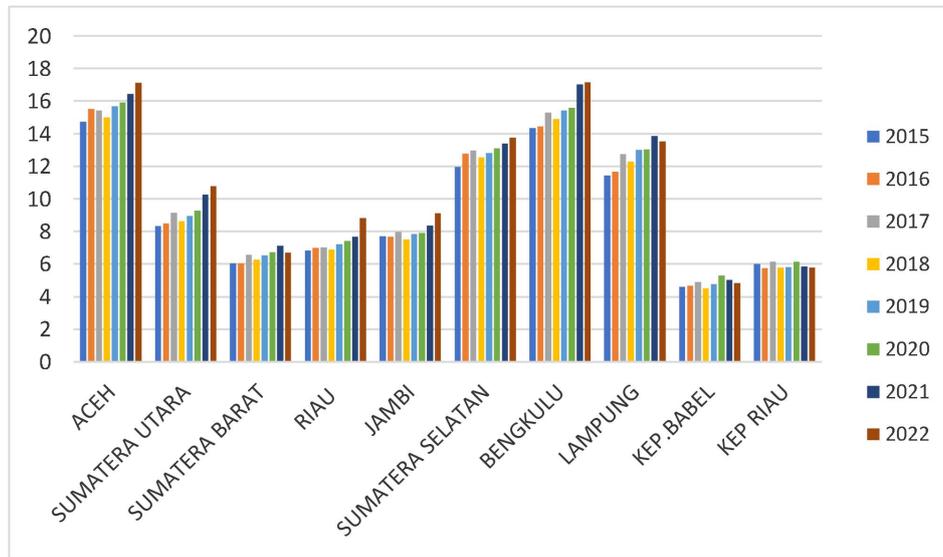
#### DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Sa'diyah El. 2020. "KEMISKINAN DAN FAKOR-FAKTOR PENYEBABNYA." *Journal of Social Work and Social* 1(April):43–50.
- Agustin, Nadya, M. Syurya Hidayat, and Etik Umiyati. 2019. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Merangin." *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* 8(1):53–64. doi: 10.22437/pdpd.v8i1.7346.
- Andhykha, Ridho, Herniwati Retno Handayani, and Nenik Woyanti. 2018. "Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, Dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah." *Media Ekonomi Dan Manajemen* 33(2):113–23. doi: 10.24856/mem.v33i2.671.
- Aprilia, Rizki Dita. 2016. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 1–19.
- Armelly, Armelly, Muhammad Rusdi, and Esti Pasaribu. 2021. "Analisis Sektor Unggulan Perekonomian Indonesia: Model Input-Output." *SOROT* 16(2). doi: 10.31258/sorot.16.2.119-134.
- Ayu Nurlita, Cony, Adnan Haris Musa, and Rahcmad Budi Suharto. 2017. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Miskin Di Samarinda." *Jiem* 2(1):2017.
- Azriyansyah, Zikri. 2022. "Analisis Pengaruh Ipm, Pdrb Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Periode Tahun 2017-2021." *Ebismen* 1(3):225–38.
- Azzahra, Salma, Westi Riani, and Ade Yunita Mafruhat. 2022. "Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di 34 Provinsi – Indonesia Pada Tahun 2015-2020." *Bandung Conference Series: Economics Studies* 2(1):1–8. doi: 10.29313/bcses.v2i1.215.
- Bagianto, A., & Zulkarnaen, W. (2020). FACTORS AFFECTING ECONOMIC DEVELOPMENT. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 316-332. <https://doi.org/10.31955/mea.v4i1.263>
- Damanik, Rapika Kesatriani, and Selna Aprilia Sidauruk. 2020. "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Darma Agung* 28(3):358. doi: 10.46930/ojsuda.v28i3.800.
- Ela Melia Nisa, and Elok Fitriani Rafikasari. 2022. "Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Kemiskinan Dan Ipm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Periode 2016-2020." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1(5):483–92. doi: 10.53625/juremi.v1i5.1427.
- Fajriansyah, Saman, and Ika Chandriyanti. 2022. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Selatan." *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 5(2). doi: 10.20527/jiep.v5i2.6957.
- Fatmasari, Yuli. 2017. "Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2006-2015." 115.
- Ferdi. 2022. "Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan Di

- Kabupaten Simeulue.” *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)* 3(01):26–33. doi: 10.54209/jasmien.v3i01.250.
- Gweshengwe, Blessing, and Noor Hasharina Hassan. 2020. “Defining the Characteristics of Poverty and Their Implications for Poverty Analysis.” *Cogent Social Sciences* 6(1).
- Hardinandar, Fajrin. 2019. “Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua).” *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4(1):1–12. doi: 10.31002/rep.v4i1.1337.
- Hasibuan, Reni Ria Armayani, Anggi Kartika, Firdha Aigha Suwito, and Lismaini Agustin. 2022. “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan.” *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4(3):683–93. doi: 10.47467/reslaj.v4i3.887.
- Hildegunda, Wini. 2010. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten (Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Di Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT Tahun 2005-2009).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Irawan, Edi. 2022. “The Effect of Unemployment, Economic Growth and Human Development Index on Poverty Levels in Sumbawa Regency in 2012-2021.” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 6(2):950. doi: 10.29040/ijebar.v6i2.5455.
- Isiaka, Najeem, Isiaka, Najeem, and Olayiwola, Habeeb Olaniyi. 2022. “Inflation Rate and Poverty Incidence Nexus in Nigeria: Does Lending Rate Moderates The Effect.” *International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology (IJESET)* 1(5):307–15. doi: 10.55983/ijeset.v1i5.327.
- mad, Ah, Muhammad Syarif, Fajar Saranani, and Wali Aya Rumbia. 2019. “The Impact of Human Development Index on Poverty in Southeast Sulawesi.” *International Journal of Economics and Management Studies* 6(12):30–36. doi: 10.14445/23939125/ijems-v6i12p104.
- Al Makhrus, Muhammad Nidhom, and Unggul Priyadi. 2022. “Determinan Faktor-Faktor Inflasi Di Indonesia Tahun 1990-2020.” *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan* 1(1):101–10. doi: 10.20885/jkek.vol1.iss1.art10.
- Mardiatillah, Rezki, Maya Panorama, and Maftukhatusolikhah Maftukhatusolikhah. 2021. “Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 10(2):365–70. doi: 10.19109/intelektualita.v10i2.8825.
- Meidona, Syofria, Novi Hendri, Sumarni a, and Dina Putri Delima. 2022. “The Effect of Gross Regional Domestic Product and Number of Population on Poverty Level in Padang Pariaman District Indonesia.” *International Journal of Advanced Research* 10(04):315–24. doi: 10.21474/ijar01/14550.
- Ningsih, Desrini, and Puti Andiny. 2018. “Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Samudra Ekonomika* 2(1):53–61.
- Pasaribu, Esti. 2022. “Kajian Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Indonesia.” *CONVERGENCE : THE JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT* 4(2):1–13.
- Pramesona, Bayoe. 2021. “Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia Dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Luwu Timur.” *Jurnal Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia* 8.

- Prasetyoningrum, Ari Kristin. 2018. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6(2):217. doi: 10.21043/equilibrium.v6i2.3663.
- Purwono, Rudi, Wahyu Wisnu Wardana, Tri Haryanto, and M. Khoerul Mubin. 2021. "Poverty Dynamics in Indonesia: Empirical Evidence from Three Main Approaches." *World Development Perspectives* 23. doi: 10.1016/j.wdp.2021.100346.
- Ratih Primandari, Novegya. 2019. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Selatan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 16(1):1–10. doi: 10.29259/jep.v16i1.8856.
- Ritonga, Marito, and Tri Wulantika. 2020. "Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018)." *Jurnal Diversita* 6(1):95–102. doi: 10.31289/diversita.v6i1.3135.
- Simanungkalit, Erika Feronika Br. 2023. "Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)* 16(1):197–206. doi: 10.35508/jom.v16i1.9775.
- Sugiharti, Lilik, Rudi Purwono, Miguel Angel Esquivias, and Ari Dwi Jayanti. 2022. "Poverty Dynamics in Indonesia: The Prevalence and Causes of Chronic Poverty." *Journal of Population and Social Studies* 30. doi: 10.25133/JPSSv302022.025.
- Suharianto, Joko, and Harumi Ramadhani Lubis. 2022. "Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara." *Niagawan* 11(2):168. doi: 10.24114/niaga.v11i2.35113.
- Syahputri, Regina Kezia Rahayu, and Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah. 2023. "Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur." *Independent: Journal of Economics* 2(2):169–84. doi: 10.26740/independent.v2i2.50990.
- Utami, Hapsari Wiji. 2018. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013." *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 4(01):11–20. doi: 10.30957/ekosiana.v4i01.41.
- Wang, Hanjie, Qiran Zhao, Yunli Bai, Linxiu Zhang, and Xiaohua Yu. 2020. "Poverty and Subjective Poverty in Rural China." *Social Indicators Research* 150(1):219–42. doi: 10.1007/s11205-020-02303-0.
- Yelvita, Feby Sri. 2022. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Selatan Saman." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 5(8.5.2017):2003–5.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Grafik 1. Persentase Kemiskinan di Pulau Sumatera  
Sumber: www.bps.go.id

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-Section F	1018.005529	(9,66)	0.000
Cross-Section Chi-square	395.227862	9	0.000

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	32.047841	4	0.0000

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Uji	Statistic	Prob.
Jarque-Bera (JB)	4.254167	0.119184

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	KEMISKINAN	INFLASI	IPM	PDRB	UMP
KEMISKINAN	1.000000	-0.022613	-0.441184	0.611036	-0.128071
INFLASI	-0.022613	1.000000	-0.049216	-0.010513	-0.055917
IPM	-0.441184	-0.049216	1.000000	0.095334	0.548672
PDRB	0.611036	-0.010513	0.095334	1.000000	0.047447
UMP	-0.128071	-0.055917	0.548672	0.047447	1.000000

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.0303038	0.293227	1.033457	0.3052
INFLASI	6.818972	0.000785	0.086911	0.9310
IPM	-0.003765	0.004599	-0.818679	0.4159
PDRB	-2.132767	1.011572	-2.108368	0.1387
UMP	-0.011894	0.012313	-0.966045	0.3375

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.743809	0.634565	4.323921	0.0001
INFLASI	0.003335	0.001698	1.964348	0.0537
IPM	-0.029272	0.009953	-2.941150	0.0045
PDRB	-1.467832	2.189113	-6.705147	0.0000
UMP	-0.106845	0.026646	-4.009844	0.0002
R-squared	0.997468			
F-statistic	2000.240			
Prob(F-statistic)	0.000000			